

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan desa harus diupayakan agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa sumberkima adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar, dimana dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-

undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa, maka bentuk BUMDes dapat beragam di setiap Desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif (bekerja sama), partisipatif (pengikutsertaan), transparansi (secara terbuka), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan sustainable (secara berkelanjutan). Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan dari BUMDes, dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PEMDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi (dapat menimbulkan tidak efisiennya ekonomi) di pedesaan dari usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandara yang berada di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng memiliki suatu unit usaha yaitu dalam pemberian kreditnya. Berbeda dengan BUMDes pada

umumnya, BUMDes Tirta Mandara ini dalam pemberian kreditnya belum sepenuhnya menerapkan standar operasional prosedur yang semestinya dalam pemberian kredit kepada masyarakat setempat. Pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandara ini lebih difokuskan untuk masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah. Dengan persyaratan untuk pengajuan kredit lebih mudah dari semestinya, tentu kebijakan ini akan membuat nasabah BUMDes Tirta Mandara jumlahnya akan semakin banyak. Namun disisi lain resiko yang harus diterima oleh BUMDes Tirta Mandara juga semakin besar, salah satu resiko yang sangat mungkin terjadi adalah kredit bermasalah (kredit macet). Maka dari itu dibutuhkan sistem pengendalian internal untuk membantu meminimalisir kredit macet, meskipun tidak secara langsung dapat berhasil mengatasi kredit macet tersebut. Sistem pengendalian internal merupakan suatu sistematis yang dibuat oleh suatu organisasi atau badan usaha yang tujuannya untuk mencapai cita-cita perusahaan. Dengan adanya sistem pengendalian internal akan membuat segala aktivitas dapat dikontrol dengan baik karena sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan struktur dengan keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Dalam hal ini BUMDes Tirta Mandara dalam membuat suatu sistem pengendalian internal untuk pemberian kredit, karena kredit ini lebih difokuskan untuk masyarakat menengah kebawah saat pengajuan kredit masyarakat terlebih dahulu mengisi formulir, menyerahkan foto kopi kartu keluarga, KTP dan KIS dan jumlah pinjaman hanya dibatasi yaitu hanya Rp 2.000.000 saja dan tanpa jaminan apapun. Dan untuk melindungi asset, penyalahgunaan atau kecurangan dari pihak internal ataupun pihak eksternal

dari BUMDes Tirta Mandara ini (pegawai ataupun masyarakat), akan dilakukan rapat evaluasi setiap bulannya. Seperti evaluasi kinerja karyawan, evaluasi perkembangan BUMDes, permasalahan kredit macet. Saat terjadi permasalahan pada kredit macet, pihak dari BUMDes mendatangi secara langsung masyarakat yang mengalami kredit bermasalah atau kredit macet untuk diberikan pengarahan dan diberikan solusi yaitu dengan pemungutan tabungan setiap harinya. Pihak BUMDes dalam mendatangi langsung nasabah yang mengalami kredit macetnya selalu menerapkan sikap kekeluargaan berbicara layaknya seperti keluarga dan tidak memberikan surat-surat pemberitahuan kredit telah jatuh tempo seperti yang dilakukan BUMDes lainnya maupun lembaga-lembaga lainnya.

Selain dalam sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit, dalam hal ini juga pembentukan BUMDes juga tidak terlepas dari bantuan dana dari desa yaitu melalui APBDes, dimana dari desa sendiri memberikan sejumlah dana untuk BUMDes dan dana ini digunakan untuk penguatan modal usaha pada BUMDes salah satunya yaitu untuk usaha simpan pinjam. Selain untuk penguatan modal, dana APBDes ini juga digunakan untuk menangani kredit macet sejauh memang bila dana ini benar-benar diperlukan untuk menalangi kredit macet nasabah terlebih dahulu.

Namun meskipun demikian, masyarakat tersebut (nasabah yang menunggak) tidak lepas dari tanggung jawabnya. Dan jika terdapat masyarakat (nasabah) tetap tidak menjalankan alternatif yang sudah diberikan oleh pihak BUMDes maka masyarakat (nasabah) tersebut akan di Blacklist. Blacklist dalam hal ini dimaksudkan, bahwa bagi masyarakat yang tidak menjalankan

kewajibannya tidak akan mendapat pelayanan lagi didalam BUMDes tersebut namun harus tetap melunasi kewajibannya. Dalam hal penanggulangan dari dana APBDes tersebut, tentu saja sudah mendapat persetujuan dari kepala desa sumberkima selaku pengawas pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandara, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandara, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program namun belum membuahkan dampak yang memuaskan bagi kesejahteraan masyarakat desa.
2. Intervensi pemerintah terlalu besar menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan.
3. Masih belum optimalnya pemanfaatan semua unit usaha yang ada di BUMDes Tirta Mandara kepada masyarakat, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang maksimal.

4. Dampak dari BUMDes Tirta Mandara akan kesejahteraan masyarakat desa belum merata, karena tidak semua masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik.
5. Pemberian Kredit Pada Bumdes Tirta Mandara Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng masih belum dilaksanakan secara optimal oleh petugas BUMDes Tirta Mandara.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, dapat diketahui bahwa masalah-masalah penelitian ini sangat luas. Mengingat keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian serta untuk membuat penelitian lebih terarah, maka masalah yang dikaji dibatasi pada Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit pada BUMDes Tirta Mandara Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandara, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana Alokasi APBDDes dalam memperkuat modal usaha pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandara, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandara Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui bagaimana Alokasi APBDDes dalam memperkuat modal usaha pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandara, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan, maka hasil penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian ilmiah khususnya dalam bidang akuntansi. Serta dapat digunakan sebagai referensi atau penelitian agar terdapat wacana yang diharapkan berubah menjadi suatu tindakan nyata untuk mensejahterakan masyarakat dengan adanya keberadaan BUMDes di desa.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme Pemberian Kredit Pada Bumdes Tirta Mandara Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sehingga

dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam ikut mengelola keberadaan Pemberian Kredit

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja BUMDes Tirta Mandara agar dapat melaksanakan Pemberian Kredit secara transparan dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

c. Bagi Lembaga Undiksha

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau referensi bagi lembaga dan peneliti selanjutnya.

